

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ageng Nata Praja. 2009. Tesis *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society Di Kabupaten Grobogan*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Abdul Fickar Hadjar. 2006. Makalah “*Pertumbuhan LSM, Demonstrasi dan Demokrasi Era Reformasi*”. Kesbang DKI Jakarta.
- Adi Suryadi Culla. 2005. *Masyarakat Sipil dalam Perspektif Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia (Studi Kasus Walhi dan YLBHI dalam Era Orde Baru)*. Ringkasan Disertasi. Bidang Studi Ilmu Politik Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Affan Gafar. 2006. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Akmal Salim Ruhana. 2010. *Peran dan Hubungan LSM dan Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Carmen Malena. 1995. “*Practical Guide to Operational Collaboration between The World Bank and Non-governmental Organizations Operations Policy Department*”. NGO UNIT, OPRPGA. World Bank.
- Franz Magnis-Suseno. 1999. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Friska Mahardika. 2012. Skripsi *Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Purwokerto)*. Universitas Jenderal Sudirman. Purwokerto.
- Hamid Abidin dkk. 2004. *Kritik dan Otokritik LSM*. Piramedia. Jakarta.
- Jordan Lisa, Tuijl-Peter Van. 2009. *Akuntabilitas LSM: Politik, Prinsip dan Inovasi*. LP3ES. Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Press. Jakarta.
- _____. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum, Media, dan HAM*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Meuthia-Ganie-Rochman dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed.). 2002. *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat: Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*. LP3ES. Jakarta.
- Moh. Nasir. 1985. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Alim. 2001. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*. UII Press. Yogyakarta.
- Muhammad AS Hikam. 1990. *Demokrasi dan Civil Society*. LP3ES. Jakarta.
- M. Najib Ibrahim. 2011. Dalam Tesis “*Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*.” Universitas Indonesia. Depok.
- Mansoer Fakhri. 1996. *Masyarakat sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2005. *Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia: Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Jurnal Hukum Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 1)
- Satya Arinanto. 2008. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Sri Utari. 2004. *Disertasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul (Suatu Kajian tentang Parpol*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Zaim Saidi dkk. 2004. *Merebut Hati Lembaga Donor*. Piramedia. Jakarta.
- _____. 2008. *Peluang dan Tantangan Akuntabilitas LSM*. Piramedia. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Staatsblad No. 1870 No. 64 (Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya.

C. Artikel

Abdul Hakim G. Nusantara, "*Lindungi Kebebasan Berserikat*", Opini, Harian Kompas, Senin, 6 September 2010, hal. 7.

Budi Setiyono, "Pengawasan Pemilu oleh LSM", *Suara Merdeka*, 15 Oktober 2003.

Dian Pella, "*Peran LSM dalam Pemberdayaan Masyarakat*", diakses melalui website <http://noteofdianpella.blogspot.co.id/2014/01>

Enny Soeprapto, *Instrumen Pokok HAM Internasional, Pengesahan Dan Implementasinya Di Indonesia*, http://www.komnasham.go.id/portal/files/ES_InstrumenPokokHAMdiIndonesia.pdf, diakses pada 08 Januari 2017.

Jimly Asshiddiqie, *Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*, Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “*Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah: Tantangan dan Penyikapan Bersama*”, Jakarta, 27 November 2007.

Indra J. Piliang. *Otokritik Terhadap LSM*. Suara Pembaruan. 15 September 2006.

Kompas Diakses pada 13 Januari 2003 dalam *NGO ditengah Kepungan Kepentingan Global*, <http://lafadl.wordpress.com/2006/07/15/ngo-ditengah-kepungan-kepentingan-global/>.

Majalah Konstitusi Nomor 43, Agustus 2010.

Pasal 20 Piagam PBB <http://www.un.org/en/documents/udhr/>, Diunduh pada 29 Desember 2016.

Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri dalam rapat gabungan di DPR-RI, pada tanggal 30 Agustus 2010 Lihat <http://www.tempointeraktif.com>, Edisi Senin, 30 Agustus 2010.

Wikipedia, *Lembaga Swadaya Masyarakat* di akses rabu 10 juni 2015 di website http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Swadaya_Masyarakat_LSM.

D. Peraturan Lainnya

Universal Declaration of Human Rights 1948.

European Convention on Human Rights 1950.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

American Convention on Human Rights 1969.